BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah daerah di Indonesia yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pemerintah daerah baik dalam penggalian maupun optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang ada di daerahnya.

Dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2015 mengenai adanya kewenangan daerah merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya secara lebih efisien. Daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya masing-masing mendapat kebebasan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerahnya. Untuk beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Berikut disajikan kondisi keuangan Provinsi di Indonesia yang menampilkan profil kondisi keuangan yang menunjukkan adanya gejala *Fiscal Stress* (Tekanan Anggaran) terdapat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2018
(Dalam Jutaan)

Provinsi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Belanja Modal		Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan BM (%)
	2017	2018	2017	2018		
Aceh	2.276.306	2.359.385	2.168.299	2.503.941	3,65	15,48
Sumatera Utara	5.287.469	5.638.961	1.919.452	1.564.903	6,65	-18,47
Sumatera Barat	2.134.011	2.275.090	832.177	1.099.701	6,61	32,15
Riau	3.360.009	3.638.996	1.941.215	1.046.853	8,30	-46,07
Jambi	1.580.305	165.570	895.648	784.724	-89,52	-12,38
Sumatera Selatan	3.031.634	3.528.011	1.377.383	1.537.275	16,37	11,61
Bengkulu	804.576	872.258	711.074	618.478	8,41	-13,02
Lampung	2.750.596	2.864.236	1.451.485	1.729.327	4,13	19,14
Bangka Belitung	2.750.596	2.864.236	368.210	315.398	4,13	-14,34
Kepulauan Riau	1.094.789	1.220.768	495.726	620.057	11,51	25,08
DKI Jakarta	43.901.489	43.327.137	11.045.723	14.118.608	-1,31	27,82
Jawa Barat	18.081.124	19.642.915	2.311.616	3.145.847	8,64	36,09
Jawa Tengah	12.547.513	13.711.836	154.598	1.681.752	9,28	987,82
DI Yogyakarta	1.851.973	2.040.723	1.046.730	1.132.828	10,19	8,23
Jawa Timur	17.324.178	18.531.062	3.090.056	2.840.552	6,97	-8,07
Banten	5.756.371	6.329.138	1.349.687	1.362.551	9,95	0,95
Bali	3.398.472	3.718.500	660.433	440.710	9,42	-33,27
Nusa Tenggara Barat	1.684.469	1.660.418	1.153.481	891.887	-1,43	-22,68
Nusa Tenggara Timur	1.047.492	1.095.270	482.925	529.761	4,56	9,70
Kalimantan Barat	1.945.647	2.194.868	954.917	676.487	12,81	-29,16
Kalimantan Tengah	1.342.331	1.616.522	565.245	1.060.394	20,43	87,60
Kalimantan Selatan	2.841.892	3.557.317	1.388.009	1.117.197	25,17	-19,51
Kalimantan Timur	4.588.752	5.800.270	938.339	1.829.260	26,40	94,95
Kalimantan Utara	482.741	574.088	655.214	637.663	18,92	-2,68
Sulawesi Utara	1.146.675	1.253.805	*757.830*	721.403	9,34	-4,81
Sulawesi Tengah	958.212	1.016.629	465.121	459.781	6,10	-1,15
Sulawesi Selatan	3.679.084	3.948.349	1.051.187	1.081.806	7,32	2,91
Sulawesi Tenggara	806.254	903.949	903.122	795.197	12,12	-11,95

Provinsi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Belanja Modal		Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan BM (%)
	2017	2018	2017	2018		
Gorontalo	348.268	384.435	254.842	280.500	10,39	10,07
Sulawesi Barat	296.935	301.500	459.836	321.975	1,54	-29,98
Maluku	430.866	465.780	545.781	601.515	8,10	10,21
Maluku Utara	327.470	358.325	561.614	513.352	9,42	-8,59
Papua Barat	1.015.781	1.050.372	2.328.013	1.918.505	3,41	-17,59
Papua	470.072	459.243	770.103	1.539.272	-2,30	99,88
RATA-RATA					6,05	34,88

Sumber : Badan Pemeriksa keuangan RI 2020 (Diolah)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2018 yaitu 6,05%, sedangkan pertumbuhan Belanja Modal sangat mendominasi yaitu 34,88%. Dominasi ini tentu saja akan berpengaruh buruk pada jangka panjang, mengingat belanja daerah terutama belanja modal akan semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam rangka mendorong penyelenggaraan pembangunan di setiap provinsi. Jika hal ini tidak diikuti dengan peningkatan PADnya, maka ketergantungan pada dana dari pusat (dana transfer) akan memicu terjadinya fenomena yang disebut *Fiscal Stress.*

Fiscal stress adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia (Septira et al., 2019). Konsekuensinya, tekanan anggaran *(fiscal stress)* yang tinggi akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah dalam mengatur dan mengalokasikan anggarannya.

Studi tentang *Fiscal Stress* di tingkat daerah menjadi semakin penting, terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya dalam penyediaan barang dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahun.

Pemerintah memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menghasilkan dan memaksimalkan Pendapatan Daerah. Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi terjadinya fenomena *Fiscal Stress*.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi produk domestik yang cukup baik maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat akan meningkat dan merata. Sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi masyarakat dalam produktivitas menggali sumber potensi yang ada pada daerah, yang berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah, serta mengurangi terjadinya fenomena *Fiscal Stress*, karena daerah akan dapat membiayai pembangunan daerahnya melalui pemasukan derah yang dimiliki.

Anggaran belanja modal yang akan semakin meningkat setiap tahunnya, jika tidak adanya penerimaan daerah yang memadai untuk membiayai belanja daerah, maka hal ini akan dapat mempengaruhi terjadinya *fiscal stress,* mengingat perubahan pembiayaan akan lebih banyak disebabkan adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung dalam hal ini belanja pembangunan (Muda, 2012)

Beberapa studi terdahulu menunjukan masih adanya perbedaan hasil penelitian tentang hubungan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan belanja modal pada *fiscal stress.* Septira et al., (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), yang berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Sedangkan variabel Pertumbuhan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dwitayanti et al., (2019) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal tidak berdampak signifikan terhadap *fiscal stress*, hanya Pertumbuhan Ekonomi saja yang memiliki pengaruh signifikan pada *fiscal stress.* Penelitian lain yang tidak sejalan dengan kedua penelitian tersebut yaitu penelitian Lhutfi et al., (2019) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian, maka merupakan salah satu alasan peneliti untuk meneliti kembali. Melihat hal tersebut saya sebagai peneliti merasa tertarik untuk mengkaji kembali fenomena *Fiscal Stress* dengan menggunakan variabel – variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pertumbuhan Belanja Modal sebagai variabel X serta *Fiscal Stress* sebagai variabel Y dengan lokasi yang dilakukan pada Provinsi di Indonesia dan dalam kurun waktu yang lebih *update* (2015 – 2018) yang berjudul **"Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress* (Tekanan Anggaran) Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia**.**".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia?
2. Apakah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia?

3. Apakah pertumbuhan tingkat Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia?
4. Apakah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015 sampai dengan 2018. Untuk menganalisis statistik menggunakan alat bantu program yaitu *Economic Views (Eviews)* 11.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal dibawah ini :

1. Pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap tingkat *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.
2. Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara parsial terhadap tingkat *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.
3. Pengaruh pertumbuhan Belanja Modal secara parsial terhadap tingkat *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.
4. Pengaruh pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan Belanja Modal secara simultan terhadap tingkat *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan kinerja keuangan pemerintah.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terhadap evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi, sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Provinsi terutama dalam hal pengelolaan anggaran.
3. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah